KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2012

Oleh:

M. FAISOL

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember

Abstract

The preparation of religion law judges in doing their new competencies in dealing with syariah economy conflict is the one that need to be the first priority due to the amendment of the decree No. 7 year 1989 to the decree No. 3 year 2006 about the religion law. This research is implemented to know the preparation of religion law judges at Jember in finishing syariah economy problems as mentioned in the decree No. 3 year 2006.

The result of shows that the religion law judges at Jember are always prepared in dealing with syariah economy conflicts. However, the way of checking, deciding, and finishing the syariah economy problems has not yet tested and measured, because since the new decree No. 3 year 2006 was announced, there has not even one problem is reported at the religion law of Jember.

Kata Kunci: Kesiapan, Pengadilan Agama Jember, Ekonomi Syari'ah

PENDAHULUAN

Kajian tentang Peradilan Agama banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan *fuqaha*, ahli hukum tata negara dan para pakar dalam bidang lain. Kajian terhadap Peradilan Agama di Indonesia terus berlangsung, terutama sejak pranata Hukum Islam memiliki kedudukan yang semakin kokoh dalam pembagian kekuasaan negara, dan peranannya semakin menonjol. Ia akan tetap menarik sebagai sasaran pengkajian, karena memiliki keunikan tersendiri sebagai satu-satunya pranata keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggara kekuasaan negara.¹

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia telah menjalani perjalanan sejarah panjang yang berliku untuk sampai pada eksistensi, status, dan kedudukannya yang begitu kuat seperti sekarang ini. Dari aspek

historis keberadaan Peradilan Agama di Indonesia telah lama diakui eksistensinya. Selama Orde Baru, Peradilan Agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga, seperti soal perkawinan, sengketa waris, wasiat, wakaf, dan lain-lain. Berikutnya, karena tuntutan reformasi khususnya di bidang hukum dan peradilan, maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama ini melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Perubahan ini tentu saja dimaksudkan untuk mengakomodir tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkembang pesat.²

Sejarah juga menyaksikan betapa Peradilan Agama dalam proses perkembangannya mengalami pasang surut seiring dengan lahirnya peraturan perundang-

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 49.

² Eman Superman, *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia*; dalam *Jurnal Penegakan Hukum*. Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, hlm 21-35

undangan yang mengatur Peradilan Islam ini. Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 menandai pembaharuan Peradilan Agama meski belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang independen, mandiri, dan kokoh.

Perkembangan signifikan baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Disusul 10 tahun kemudian dengan lahirnya UU No. 35/1999 yang mengatur sistem satu atap (*one-roof system*) yang ditegaskan kembali oleh UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi, Undang-Undang No. 3/2006 tentang perubahan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama lah yang kemudian dianggap oleh banyak kalangan sebagai momentum paling bersejarah bagi perkembangan PA dengan perluasan kewenangannya dalam perkara ekonomi syari'ah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah. Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah, merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, peradilan agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Para hakim juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Di sisi lain, seluruh hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syari'ah. Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal ekonomi syari'ah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kesiapan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara-

perkara ekonomi syari'ah sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan sebagaimana berikut ini: *pertama*, bagaimana kesiapan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006? *Kedua*, upaya-upaya yang dilakukan PA Jember meningkatkan kompetensi hakim di bidang perkara ekonomi syari'ah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.³ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember. Adapun informannya adalah ketua Pengadilan Agama Jember serta beberapa hakim yang bertugas di bawah naungan Pengadilan Agama Jember yang dianggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi dari para hakim Pengadilan Agama Jember yang tidak perlu dikuantifikasi.⁴

Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti Ketua Pengadilan Agama Jember dan beberapa hakim yang bertu-

³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hlm 135.

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi*, hlm 1

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 12.

gas di bawah naungan Pengadilan Agama Jember. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Pengadilan Agama Jember, serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan Peradilan Agama, ekonomi syari'ah, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁶

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Teknik Observasi, penulis mengadakan kegiatan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Jember. (2) Teknik Wawancara, teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷ Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.⁸ Panduan wawancara ini

berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁹

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. (3) Teknik Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. (4) Teknik Pengolahan Data, Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini dengan mengklasifikasi data serta menyaring data dengan mengambil data yang cocok dengan fokus dan menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau doku-

⁶ *ibid.*

⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 193-194.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm 25.

⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm 85.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm 200.

mentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengadilan Agama Jember

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur, dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Erysyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.¹¹

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Erysyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdusnamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001

¹¹ <http://www.pajember.net/profil/profil-pa-jember.html>. Data diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.

8. Drs. H.Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum	Periode 2004-2006
10.Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11.Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Sejak September 2010

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.¹²

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jember dengan memiliki luas wilayah 3.293,34 km².

¹² *ibid.*

Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates	17. Kecamatan Sukorambi
2. Kecamatan Sumpalsari	18. Kecamatan Ajung
3. Kecamatan Patrang	19. Kecamatan Jenggawah
4. Kecamatan Arjasa	20. Kecamatan Tanggul
5. Kecamatan Jelbuk	21. Kecamatan Semboro
6. Kecamatan Pakusari	22. Kecamatan Sumberbaru
7. Kecamatan Sukowono	23. Kecamatan Bangsalsari
8. Kecamatan Kalisat	24. Kecamatan Kencong
9. Kecamatan Ledokombo	25. Kecamatan Jombang
10. Kecamatan Sumberjambe	26. Kecamatan Umbulsari
11. Kecamatan Mayang	27. Kecamatan Gumukmas
12. Kecamatan Silo	28. Kecamatan Puger
13. Kecamatan Mumbulsari	29. Kecamatan Balung
14. Kecamatan Tempurejo	30. Kecamatan Wuluhan
15. Kecamatan Rambipuji	31. Kecamatan Ambulu ¹
16. Kecamatan Panti	

Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menyelesaikan Perkara-Perkara Ekonomi Syariah

Peradilan Agama yang merupakan salah satu wadah penyelesaian secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan di sini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, di samping berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah, juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah.¹³

¹³ Lihat pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi:¹⁴

1. Bank syariah,
2. Lembaga keuangan mikro syariah,
3. Asuransi syariah,
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah,
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
7. Sekuritas syariah,
8. Pembiayaan syariah,
9. Pegadaian syariah,
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
11. Bisnis syariah

Untuk melaksanakan peran Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa syariah sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 khususnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah ini, tentulah diperlukan beberapa kesiapan yang harus terpenuhi, di antaranya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) para hakim yang bertugas dilingkungan Peradilan Agama tersebut.

Terkait dengan kesiapan para hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyambut datangnya kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka berdasarkan data yang diperoleh dari para narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa penambahan kewenangan tentang ekonomi syariah ini merupakan sebuah tantangan, namun tidak mengurangi kesiapan hakim-hakim Pengadilan Agama Jember dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan se-

¹⁴ www.badilag.net, H. Abdul Manam, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama.

suai dengan amanah Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara jelas bahwa hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.

Kesiapan hakim-hakim Pengadilan Agama Jember dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah itu ditandai adanya hakim-hakim Pengadilan Agama Jember yang berkompeten dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.¹⁵

Kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah juga didukung ketersediaan sumber hukum mareruil perkara ekonomi syari'ah sudah cukup memadai, misalnya dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU. No. 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia, UU. No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Daerah istimewa Aceh, UU. No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU. No. 21 tentang Perbankan Syari'ah, dan lain sebagainya.¹⁶

Pengadilan Agama Jember dalam menyambut kewenangan baru itu telah melakukan upaya-upaya secara maksimal guna menyiapkan segala sesuatunya sehingga tidak ada alasan untuk tidak siap dalam menyelesaikan sengketa-sengketa syari'ah.

Namun demikian, meskipun Pengadilan Agama Jember telah menyatakan kesiapannya dalam menyambut kewenangan barunya dalam hal menangani sengketa-sengketa ekonomi syari'ah, na-

mun sebenarnya kemampuan para hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah belumlah teruji dan terukur. Hal itu disebabkan karena sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tidak satupun perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Jember.

Sebagai gambaran, pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2010 saja, pada tahun 2009 sisa perkara yang belum selesai sebanyak 1.178 perkara terdiri dari (gugatan 1.142 perkara dan permohonan 36 perkara), sedang pada tahun 2010 menerima perkara sebanyak 5.293 perkara yang terdiri dari 5.151 perkara gugatan dan 142 perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 6.471 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2010 sebanyak 5.327 perkara (82,34%), sehingga sisa tundaan perkara sebanyak 1.144 perkara (17,66%).¹⁷

Sementara itu Pengadilan Agama Jember pada tahun 2010 sisa perkara yang belum selesai sebanyak 1.144 perkara terdiri dari (gugatan 1.129 perkara dan permohonan 15 perkara), sedang pada tahun 2011 menerima perkara sebanyak 5.621 perkara yang terdiri dari 5.333 perkara gugatan dan 288 perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 6.765 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2011 sebanyak 5.529 perkara (81,73%) yang terdiri dari 290 perkara permohonan serta 5.239 perkara gugatan sebagaimana matrik terlampir, sehingga sisa tundaan perkara sebanyak 1.236 perkara (18,27%) terdiri dari 13 perkara permohonan dan 1.223 perkara gugatan.¹⁸ Dan dari ribuan perkara itu tidak ada satupun perkara yang terkait dengan sengketa ekonomi syari'ah.

¹⁵ H. Sholhan, Wawancara, Rabu, 3 Oktober 2012.

¹⁶ H. Sumasno, Wawancara, Selasa, 9 Oktober 2012.

¹⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2010, hlm 43.

¹⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2011, hlm 47.

Upaya-Upaya Pengadilan Agama Jember dalam Meningkatkan Kompetensi Hakim Di Bidang Perkara Ekonomi Syariah

Sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, banyak pihak yang meragukan kemampuan aparat Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk pihak Bank Indonesia, oleh karena itu banyak pihak yang berupaya agar kewenangan tersebut tidak monopoli badan Peradilan Agama, tetapi juga lingkungan Peradilan Umum seperti dicabutnya SEMA No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang menyatakan bahwa eksekusi putusan Basyarnas dilakukan oleh Pengadilan Agama dan seperti juga ketentuan Pasal 55 (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa syariah juga bisa dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, basyarnas atau badan arbitrase lainnya, dan peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Keraguan tersebut berlanjut sampai akhir tahun 2011, namun di awal tahun 2012, ketika pihak Bank Indonesia mendapat penjelasan tentang kemampuan aparat Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan upaya-upaya Tim E dan Pokja Agama Mahkamah Agung untuk meningkatkan kemampuan aparat Peradilan Agama seperti mengikuti pelatihan di Sudan, Arab Saudi dan Negara Timur Tengah lainnya dan pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Agama, pihak Bank Indonesia sudah bisa meyakini kemampuan aparat Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan karena itu pihak Bank Indonesia meminta agar sengketa ekonomi syariah ditangani oleh hakim Peradilan Agama yang sudah bersertifikat dan disetiap Pengadilan Agama minimal terdapat satu majelis hakim yang telah mendapatkan sertifikat untuk menangani sengketa ekonomi syariah.

Menjawab keinginan pihak Bank Indonesia tersebut, Peradilan Agama menargetkan sekitar 1300 orang hakim Peradilan Agama untuk mendapatkan sertifikat mengadili sengketa ekonomi syariah. Sampai tahun 2012 sudah ada 280 orang hakim yang bersertifikat, direncanakan pada tahun 2013 akan diusulkan 120 orang hakim Peradilan Agama untuk mengikuti pelatihan tersebut, supaya target tersebut dapat dicapai. Maka apabila hakim yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekonomi syariah ternyata berhalangan untuk datang, hendaknya segera melaporkan hal itu sehingga bisa diganti oleh calon peserta yang lain.¹⁹

Pengadilan Agama Jember juga telah melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah. Langkah-langkah yang telah diambil adalah:

1. Mendorong para hakim Peradilan Agama untuk mempelajari putusan-putusan tentang sengketa ekonomi, baik syariah atau konvensional, dan baik putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum.
2. Mengadakan pelatihan ekonomi syariah bagi para hakim.
3. Mempelajari cara penanganan dan pembuatan putusan tentang sengketa ekonomi dari hakim peradilan umum yang pernah menangani sengketa ekonomi.
4. Mendorong hakim Peradilan Agama untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3 di bidang ekonomi.
5. Melakukan telaahan terhadap buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian tentang kesiapan kesiapan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara-perkara

¹⁹Laporan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah Oleh Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH, lihat: http://www.pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=157:fatur&catid=42:artikelbebas&Itemid=154

ekonomi syari'ah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Penambahan kewenangan Pengadilan Agama Jember tentang ekonomi syari'ah ini merupakan sebuah tantangan namun tidak mengurangi kesiapan hakim-hakim Pengadilan Agama Jember dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini dikarenakan sesuai dengan amanah Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara jelas bahwa hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah ditunjukkan dalam Penetapan Majelis Hakim (PMH) hakim-hakim yang memang benar-benar kompeten di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah. Ketika ada sengketa perkara ekonomi syari'ah majelis hakim yang menyidangkan perkaranya adalah hakim-hakim khusus yang dipersiapkan untuk menangani perkara tersebut. Kesiapan itu didukung sepenuhnya dengan ketersediaan sumber hukum mareruil perkara ekonomi syari'ah sudah cukup memadai, misalnya dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU. No. 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia, UU. No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Daerah istimewa Aceh, UU. No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU. No. 21 tentang Perbankan Syari'ah, dan lain sebagainya.

Namun demikian, sungguhpun Pengadilan Agama Jember telah menyatakan kesiapannya dalam menyambut kewenangan barunya dalam hal menangani

sengketa-sengketa ekonomi syari'ah, namun sebenarnya kemampuan para hakim Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah belumlah teruji dan terukur. Hal itu disebabkan karena sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tidak satupun perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Jember.

Kedua, Pengadilan Agama Jember terus berupaya meningkatkan kompetensi para hakimnya khususnya terkait dengan kompetensi dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan arahan Pokja Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia: (1) Mengadakan pelatihan hakim peradilan agama, baik di dalam maupun di luar Indonesia, (2) Mendorong para hakim Peradilan Agama untuk mempelajari putusan-putusan tentang sengketa ekonomi, baik syariah atau konvensional, dan baik putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum. (3) Mempelajari cara penanganan dan pembuatan putusan tentang sengketa ekonomi dari hakim peradilan umum yang pernah menangani sengketa ekonomi. (4) Mendorong hakim Peradilan Agama untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3 di bidang ekonomi. (5) Melakukan telaah terhadap buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Melton Putra
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press

- Ghozalie, Fathurrohman. *Laporan Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah*. http://www.pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=157:fatur&catid=42:artikelbebas&Itemid=154
- <http://www.pajember.net/profil/profil-pajember.html>.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2010, 43.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Tahun 2011, 47.
- Manam, H. Abdul <http://www.badilag.net/Pe penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama>.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Superman, Eman. 2006. Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia; dalam *Jurnal Penegakan Hukum*. Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, 21-35
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Wawancara. H. Sholhan, Rabu, 3 Oktober 2012.
- Wawancara. H. Sumasno, Selasa, 9 Oktober 2012.

Kesiapa Hakim Pengadilan Agama....